



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR **8** TAHUN 2016  
TENTANG  
KODE JABATAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman, pembentukan, serta penggunaan kode jabatan, singkatan dan akronim Kementerian Agama yang baku, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Kode Jabatan, Singkatan, dan Akronim pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KODE JABATAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Kode Jabatan, Singkatan, dan Akronim pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kode Jabatan, Singkatan, dan Akronim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi seluruh satuan organisasi/kerja Kementerian Agama.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Januari 2016



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN *l*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
KODE JABATAN, SINGKATAN DAN AKRONIM  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Kementerian Agama, serta peraturan perundang-undangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama diperlukan pengaturan kode jabatan, singkatan, dan akronim pada Kementerian Agama.

Belum ditetapkannya keputusan tentang kode jabatan, singkatan, dan akronim pada Kementerian Agama menyebabkan kurang lancarnya komunikasi antarsatuan organisasi dan satuan kerja Kementerian Agama serta pemangku kepentingan. Demi kelancaran dan efektivitas komunikasi organisasi serta untuk menghindari ketidakjelasan penggunaan kode jabatan, singkatan, dan akronim diperlukan keputusan tentang kode jabatan, singkatan, dan akronim pada Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Kode Jabatan, Singkatan, dan Akronim pada Kementerian Agama dimaksudkan sebagai acuan bagi satuan organisasi, satuan kerja, dan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama dalam menggunakan kode jabatan, singkatan, dan akronim.

2. Tujuan

Kode Jabatan, singkatan, dan akronim pada Kementerian Agama bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemahaman yang sama serta kejelasan dan kemudahan komunikasi bagi satuan organisasi, satuan kerja, dan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama serta pemangku kepentingan; dan
- b. melancarkan komunikasi organisasi dalam pemanfaatan teknologi informasi.

### C. Asas

Asas penetapan kode jabatan, singkatan, dan akronim sebagai berikut:

1. kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia;
2. kesamaan dalam pengertian dan pemahaman;
3. kemudahan dalam penggunaan dan komunikasi;
4. pembedaan yang jelas dalam kode jabatan, singkatan, dan akronim;
5. kesesuaian dengan tuntutan lingkungan; dan
6. penghindaran dari kesalahan berbahasa, kesan tidak sopan, tidak santun, dan kesalahpahaman.

### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup keputusan ini meliputi:

1. Pembentukan kode jabatan, singkatan, dan akronim pada Kementerian Agama; dan
2. Penggunaan kode jabatan, singkatan, dan akronim pada Kementerian Agama.

### E. Pengertian Umum

Pengertian umum dalam keputusan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kode jabatan adalah kode jabatan yang terdapat pada satuan organisasi dan satuan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Singkatan adalah bentuk ringkas nama yang terdiri dari paling sedikit dua kata dan disusun dari setiap huruf awal serta semua ditulis dengan huruf kapital.
3. Akronim adalah bentuk ringkas nama yang terdiri dari paling sedikit dua kata dan disusun dengan menggunakan huruf atau suku/ bagian kata atau gabungan huruf dan suku/ bagian kata dari setiap kata yang diringkas sehingga membentuk kata baru.
4. Gabungan singkatan dan akronim adalah gabungan singkatan dan akronim atau akronim dan singkatan.
5. Satuan Organisasi yang selanjutnya disebut Sator adalah bagian dari suatu organisasi yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan administrasi dalam arti terbatas yang di dalamnya terdapat pejabat-pejabat yang mengurus administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum.
6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah satuan-satuan di bawah satuan organisasi yang melaksanakan administrasi tertentu dan tidak memenuhi unsur-unsur yang menangani administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

## BAB II

### PEMBENTUKAN KODE JABATAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM

#### A. Kode Jabatan

Pemberian kode jabatan pada Sator, Satker, dan UPT Kementerian Agama diurutkan berdasarkan organisasi dan tata kerja dan urutannya disesuaikan dengan struktur organisasi pada organisasi dan tata kerja masing-masing unit organisasi. Kewenangan penetapan kode jabatan sebagai berikut:

1. Kode jabatan pada Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Balai Pendidikan dan Pelatihan, Balai Penelitian dan Pengembangan, Asrama Haji, Kantor Urusan Haji, dan Unit Pelaksana Teknis yang mengalami perubahan atau penyempurnaan organisasi dan tata kerja perlu diikuti dengan penyempurnaan dan penetapan kode jabatan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
2. Penyusunan Kode Jabatan satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, serta Madrasah Negeri dilakukan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
3. Penyusunan Kode Jabatan satuan kerja pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dilakukan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor atau Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

#### B. Kode Jabatan pada Kementerian Agama sebagai berikut:

1. Kode Jabatan Kementerian Agama Tingkat Pusat

| NO | NAMA UNIT ORGANISASI |                         |                                                        | KODE JABATAN |
|----|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Menteri Agama        |                         |                                                        | MA           |
| 2. | Sekretaris Jenderal  |                         |                                                        | SJ           |
|    | a.                   | Kepala Biro Perencanaan |                                                        | B.I          |
|    |                      | 1)                      | Kepala Bagian Pengembangan Sistem dan Data Perencanaan | B.I.1        |
|    |                      | 2)                      | Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran I               | B.I.2        |
|    |                      | 3)                      | Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran II              | B.I.3        |
|    |                      | 4)                      | Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran III             | B.I.4        |
|    | b.                   | Kepala Biro Kepegawaian |                                                        | B.II         |
|    |                      | 1)                      | Kepala Bagian Data dan Informasi Kepegawaian           | B.II.1       |
|    |                      | 2)                      | Kepala Bagian Perencanaan dan Penghargaan              | B.II.2       |

| NO | NAMA UNIT ORGANISASI |                                              |                                                                                | KODE JABATAN |
|----|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                      | 3)                                           | Kepala Bagian Mutasi                                                           | B.II.3       |
|    |                      | 4)                                           | Kepala Bagian <i>Assessment</i> dan Pengembangan Pegawai                       | B.II.4       |
|    | c.                   | Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara |                                                                                | B.III.       |
|    |                      | 1)                                           | Kepala Bagian Perbendaharaan                                                   | B.III.1      |
|    |                      | 2)                                           | Kepala Bagian Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum | B.III.2      |
|    |                      | 3)                                           | Kepala Bagian Pengelola Barang Milik Negara                                    | B.III.3      |
|    |                      | 4)                                           | Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan                                 | B.III.4      |
|    | d.                   | Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana      |                                                                                | B.IV         |
|    |                      | 1)                                           | Kepala Bagian Organisasi                                                       | B.IV.1       |
|    |                      | 2)                                           | Kepala Bagian Tata Laksana                                                     | B.IV.2       |
|    |                      | 3)                                           | Kepala Bagian Penyusunan Naskah dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan            | B.IV.3       |
|    |                      | 4)                                           | Kepala Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi                                      | B.IV.4       |
|    | e.                   | Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri |                                                                                | B.V          |
|    |                      | 1)                                           | Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan                         | B.V.1        |
|    |                      | 2)                                           | Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Keputusan Menteri                      | B.V.2        |
|    |                      | 3)                                           | Kepala Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum                                     | B.V.3        |
|    |                      | 4)                                           | Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri                                           | B.V.4        |
|    | f.                   | Kepala Biro Umum                             |                                                                                | B.VI         |
|    |                      | 1)                                           | Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian                                           | B.VI.1       |
|    |                      | 2)                                           | Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan                                              | B.VI.2       |
|    |                      | 3)                                           | Kepala Bagian Perlengkapan                                                     | B.VI.3       |
|    |                      | 4)                                           | Kepala Bagian Rumah Tangga                                                     | B.VI.4       |
|    | g.                   | Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama         |                                                                                | B.VII        |
|    |                      | 1)                                           | Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan          | B.VII.1      |
|    |                      | 2)                                           | Kepala Bidang Harmonisasi Umat Beragama                                        | B.VII.2      |
|    |                      | 3)                                           | Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Khonghucu                                   | B.VII.3      |

| NO | NAMA UNIT ORGANISASI                 |                                                                                                     | KODE JABATAN |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | h.                                   | Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat                                                      | B.VIII       |
|    |                                      | 1) Kepala Bidang Data                                                                               | B.VIII.1     |
|    |                                      | 2) Kepala Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika                                               | B.VIII.2     |
|    |                                      | 3) Kepala Bidang Hubungan Masyarakat                                                                | B.VIII.3     |
| 3. | Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |                                                                                                     | DJ.I         |
|    | a.                                   | Sekretaris Direktorat Jenderal                                                                      | Set.I        |
|    |                                      | 1) Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Infomasi                                                    | Set.I.1      |
|    |                                      | 2) Kepala Bagian Keuangan                                                                           | Set.I.2      |
|    |                                      | 3) Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian                                          | Set.I.3      |
|    |                                      | 4) Kepala Bagian Umum                                                                               | Set.I.4      |
|    | b.                                   | Direktur Pendidikan Madrasah                                                                        | Dt.I.I       |
|    |                                      | 1) Kepala Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi                                                      | Dt.I.I.1     |
|    |                                      | 2) Kepala Subdirektorat Pendidikan dan Tenaga Kependidikan                                          | Dt.I.I.2     |
|    |                                      | 3) Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana                                                        | Dt.I.I.3     |
|    |                                      | 4) Kepala Subdirektorat Kelembagaan                                                                 | Dt.I.I.4     |
|    |                                      | 5) Kepala Subdirektorat Kesiswaan                                                                   | Dt.I.I.5     |
|    | c.                                   | Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren                                                    | Dt.I.II      |
|    |                                      | 1) Kepala Subdirektorat Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah                                      | Dt.I.II.1    |
|    |                                      | 2) Kepala Subdirektorat Pendidikan Diniyah                                                          | Dt.I.II.2    |
|    |                                      | 3) Kepala Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan                                                       | Dt.I.II.3    |
|    |                                      | 4) Kepala Subdirektorat Pendidikan Pesantren                                                        | Dt.I.II.4    |
|    | d.                                   | Direktur Pendidikan Agama Islam                                                                     | Dt.I.III     |
|    |                                      | 1) Kepala Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak | Dt.I.III.1   |
|    |                                      | 2) Kepala Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar                                   | Dt.I.III.2   |
|    |                                      | 3) Kepala Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama                        | Dt.I.III.3   |
|    |                                      | 4) Kepala Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas                           | Dt.I.III.4   |

| NO | NAMA UNIT ORGANISASI                             |                                   |                                                                            | KODE JABATAN |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                                                  | 5)                                | Kepala Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan | Dt.I.III.5   |
|    | e. Direktur Pendidikan Tinggi Islam              |                                   |                                                                            |              |
|    |                                                  | 1)                                | Kepala Subdirektorat Pengembangan Akademik                                 | Dt.I.IV.1    |
|    |                                                  | 2)                                | Kepala Subdirektorat Ketenagaan                                            | Dt.I.IV.2    |
|    |                                                  | 3)                                | Kepala Subdirektorat Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan                    | Dt.I.IV.3    |
|    |                                                  | 4)                                | Kepala Subdirektorat Kelembagaan                                           | Dt.I.IV.4    |
|    |                                                  | 5)                                | Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat             | Dt.I.IV.5    |
| 4. | Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah |                                   |                                                                            | DJ.II        |
|    | a.                                               | Sekretaris Direktorat Jenderal    |                                                                            | Set.II       |
|    |                                                  | 1)                                | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan                                     | Set.II.1     |
|    |                                                  | 2)                                | Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian                    | Set.II.2     |
|    |                                                  | 3)                                | Kepala Bagian Sistem Informasi Haji Terpadu                                | Set.II.3     |
|    |                                                  | 4)                                | Kepala Bagian Umum                                                         | Set.II.4     |
|    | b.                                               | Direktur Pembinaan Haji dan Umrah |                                                                            | Dt.II.I      |
|    |                                                  | 1)                                | Kepala Subdirektorat Bimbingan Jemaah Haji                                 | Dt.II.I.1    |
|    |                                                  | 2)                                | Kepala Subdirektorat Pembinaan Petugas Haji                                | Dt.II.I.2    |
|    |                                                  | 3)                                | Kepala Subdirektorat Pembinaan Haji Khusus                                 | Dt.II.I.3    |
|    |                                                  | 4)                                | Kepala Subdirektorat Pembinaan Umrah                                       | Dt.II.I.4    |
|    | c.                                               | Direktur Pelayanan Haji           |                                                                            | Dt.II.II     |
|    |                                                  | 1)                                | Kepala Subdirektorat Pendaftaran Jemaah                                    | Dt.II.II.1   |
|    |                                                  | 2)                                | Kepala Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji                         | Dt.II.II.2   |
|    |                                                  | 3)                                | Kepala Subdirektorat Akomodasi dan Katering Haji                           | Dt.II.II.3   |
|    |                                                  | 4)                                | Kepala Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji             | Dt.II.II.4   |
|    | d.                                               | Direktur Pengelolaan Dana Haji    |                                                                            | Dt.II.III    |
|    |                                                  | 1)                                | Kepala Subdirektorat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji                     | Dt.II.III.1  |

| NO | NAMA UNIT ORGANISASI                           |                                                   |                                                                    | KODE JABATAN |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                                                | 2)                                                | Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji         | Dt.II.III.2  |
|    |                                                | 3)                                                | Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Pengelolaan Dana Haji        | Dt.II.III.3  |
|    |                                                | 4)                                                | Kepala Subdirektorat Fasilitas Badan Pengelola Dana Abadi Umat     | Dt.II.III.4  |
| 5. | Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |                                                   |                                                                    | DJ.III       |
|    | a.                                             | Sekretaris Direktorat Jenderal                    |                                                                    | Set.III      |
|    |                                                | 1)                                                | Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi                     | Set.III.1    |
|    |                                                | 2)                                                | Kepala Bagian Keuangan                                             | Set.III.2    |
|    |                                                | 3)                                                | Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian            | Set.III.3    |
|    |                                                | 4)                                                | Kepala Bagian Umum                                                 | Set.III.4    |
|    | b.                                             | Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah |                                                                    | Dt.III.I     |
|    |                                                | 1)                                                | Kepala Subdirektorat Kepenghuluan                                  | Dt.III.I.1   |
|    |                                                | 2)                                                | Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Kantor Urusan Agama              | Dt.III.I.2   |
|    |                                                | 3)                                                | Kepala Subdirektorat Kemasjidan                                    | Dt.III.I.3   |
|    |                                                | 4)                                                | Kepala Subdirektorat Produk Halal                                  | Dt.III.I.4   |
|    |                                                | 5)                                                | Kepala Subdirektorat Pembinaan Syariah                             | Dt.III.I.5   |
|    | c.                                             | Direktur Penerangan Agama Islam                   |                                                                    | Dt.III.II    |
|    |                                                | 1)                                                | Kepala Subdirektorat Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam          | Dt.III.II.1  |
|    |                                                | 2)                                                | Kepala Subdirektorat Kemitraan Umat Islam                          | Dt.III.II.2  |
|    |                                                | 3)                                                | Kepala Subdirektorat Pengembangan Musabaqah Al-qur'an dan Al-hadis | Dt.III.II.3  |
|    |                                                | 4)                                                | Kepala Subdirektorat Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam         | Dt.III.II.4  |
|    |                                                | 5)                                                | Kepala Subdirektorat Pengembangan Seni Budaya Islam                | Dt.III.II.5  |
|    | d.                                             | Direktur Pemberdayaan Zakat                       |                                                                    | Dt.III.III   |
|    |                                                | 1)                                                | Kepala Subdirektorat Sistem Informasi Zakat                        | Dt.III.III.1 |
|    |                                                | 2)                                                | Kepala Subdirektorat Penyuluhan Zakat                              | Dt.III.III.2 |
|    |                                                | 3)                                                | Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Lembaga Zakat                    | Dt.III.III.3 |
|    |                                                | 4)                                                | Kepala Subdirektorat Pengawasan Lembaga Zakat                      | Dt.III.III.4 |

| NO | NAMA UNIT ORGANISASI                             |                                                                  | KODE JABATAN |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | e.                                               | Direktur Pemberdayaan Wakaf                                      | Dt.III.IV    |
|    |                                                  | 1) Kepala Subdirektorat Sistem Informasi Wakaf                   | Dt.III.IV.1  |
|    |                                                  | 2) Kepala Subdirektorat Penyuluhan dan Kerja Sama Wakaf          | Dt.III.IV.2  |
|    |                                                  | 3) Kepala Subdirektorat Sertifikasi dan Mutasi Harta Benda Wakaf | Dt.III.IV.3  |
|    |                                                  | 4) Kepala Subdirektorat Pembinaan Nazhir dan Lembaga Wakaf       | Dt.III.IV.4  |
| 6. | Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen   |                                                                  | DJ.IV        |
|    | a.                                               | Sekretaris Direktorat Jenderal                                   | Set.IV       |
|    |                                                  | 1) Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi                | Set.IV.1     |
|    |                                                  | 2) Kepala Bagian Keuangan                                        | Set.IV.2     |
|    |                                                  | 3) Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian       | Set.IV.3     |
|    |                                                  | 4) Kepala Bagian Umum                                            | Set.IV.4     |
|    | b.                                               | Direktur Urusan Agama Kristen                                    | Dt.IV.I      |
|    |                                                  | 1) Kepala Subdirektorat Kelembagaan                              | Dt.IV.I.1    |
|    |                                                  | 2) Kepala Subdirektorat Penyuluhan                               | Dt.IV.I.2    |
|    |                                                  | 3) Kepala Subdirektorat Budaya Keagamaan                         | Dt.IV.I.3    |
|    | c.                                               | Direktur Pendidikan Agama Kristen                                | Dt.IV.II     |
|    |                                                  | 1) Kepala Subdirektorat Pendidikan Dasar                         | Dt.IV.II.1   |
|    |                                                  | 2) Kepala Subdirektorat Pendidikan Menengah                      | Dt.IV.II.2   |
|    |                                                  | 3) Kepala Subdirektorat Pendidikan Tinggi                        | Dt.IV.II.3   |
| 7. | Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik |                                                                  | DJ.V         |
|    | a.                                               | Sekretaris Direktorat Jenderal                                   | Set.V        |
|    |                                                  | 1) Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi                | Set.V.1      |
|    |                                                  | 2) Kepala Bagian Keuangan                                        | Set.V.2      |
|    |                                                  | 3) Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian       | Set.V.3      |
|    |                                                  | 4) Kepala Bagian Umum                                            | Set.V.4      |
|    | b.                                               | Direktur Urusan Agama Katolik                                    | Dt.V.I       |
|    |                                                  | 1) Kepala Subdirektorat Kelembagaan                              | Dt.V.I.1     |
|    |                                                  | 2) Kepala Subdirektorat Penyuluhan                               | Dt.V.I.2     |
|    |                                                  | 3) Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Umat                        | Dt.V.I.3     |

| NO  | NAMA UNIT ORGANISASI                          |                                             |                                                         | KODE JABATAN |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
|     | c.                                            | Direktur Pendidikan Agama Katolik           |                                                         | Dt.V.II      |
|     |                                               | 1)                                          | Kepala Subdirektorat Pendidikan Dasar                   | Dt.V.II.1    |
|     |                                               | 2)                                          | Kepala Subdirektorat Pendidikan Menengah                | Dt.V.II.2    |
|     |                                               | 3)                                          | Kepala Subdirektorat Pendidikan Tinggi                  | Dt.V.II.3    |
| 8.  | Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu  |                                             |                                                         | DJ.VI        |
|     | a.                                            | Sekretaris Direktorat Jenderal              |                                                         | Set.VI       |
|     |                                               | 1)                                          | Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi          | Set.VI.1     |
|     |                                               | 2)                                          | Kepala Bagian Keuangan                                  | Set.VI.2     |
|     |                                               | 3)                                          | Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian | Set.VI.3     |
|     |                                               | 4)                                          | Kepala Bagian Umum                                      | Set.VI.4     |
|     | b.                                            | Direktur Urusan Agama Hindu                 |                                                         | Dt.VI.I      |
|     |                                               | 1)                                          | Kepala Subdirektorat Kelembagaan                        | Dt.VI.I.1    |
|     |                                               | 2)                                          | Kepala Subdirektorat Penyuluhan                         | Dt.VI.I.2    |
|     |                                               | 3)                                          | Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Umat                  | Dt.VI.I.3    |
|     | c.                                            | Direktur Pendidikan Agama Hindu             |                                                         | Dt.VI.II     |
|     |                                               | 1)                                          | Kepala Subdirektorat Pendidikan Dasar                   | Dt.VI.II.1   |
|     |                                               | 2)                                          | Kepala Subdirektorat Pendidikan Menengah                | Dt.VI.II.2   |
|     |                                               | 3)                                          | Kepala Subdirektorat Pendidikan Tinggi                  | Dt.VI.II.3   |
| 9.  | Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |                                             |                                                         | DJ.VII       |
|     | a.                                            | Sekretaris Direktorat Jenderal              |                                                         | Set.VII      |
|     |                                               | 1)                                          | Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi          | Set.VII.1    |
|     |                                               | 2)                                          | Kepala Bagian Keuangan dan Umum                         | Set.VII.2    |
|     |                                               | 3)                                          | Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian | Set.VII.3    |
|     | b.                                            | Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha |                                                         | Dt.VII.I     |
|     |                                               | 1)                                          | Kepala Subdirektorat Kelembagaan                        | Dt.VII.I.1   |
|     |                                               | 2)                                          | Kepala Subdirektorat Penyuluhan                         | Dt.VII.I.2   |
|     |                                               | 3)                                          | Kepala Subdirektorat Pendidikan Dasar dan Menengah      | Dt.VII.I.3   |
|     |                                               | 4)                                          | Kepala Subdirektorat Pendidikan Tinggi                  | Dt.VII.I.4   |
| 10. | Inspektur Jenderal                            |                                             |                                                         | IJ           |
|     | a.                                            | Sekretaris Inspektorat Jenderal             |                                                         | Set.IJ       |

| NO  | NAMA UNIT ORGANISASI                                                    |                                                                             |                                                                                                 | KODE JABATAN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |                                                                         | 1)                                                                          | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan                                                          | Set.IJ.1     |
|     |                                                                         | 2)                                                                          | Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian                                         | Set.IJ.2     |
|     |                                                                         | 3)                                                                          | Kepala Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan                                                      | Set.IJ.3     |
|     |                                                                         | 4)                                                                          | Kepala Bagian Umum                                                                              | Set.IJ.4     |
|     | b.                                                                      | Inspektur Wilayah I                                                         |                                                                                                 | IJ.I         |
|     | c.                                                                      | Inspektur Wilayah II                                                        |                                                                                                 | IJ.II        |
|     | d.                                                                      | Inspektur Wilayah III                                                       |                                                                                                 | IJ.III       |
|     | e.                                                                      | Inspektur Wilayah IV                                                        |                                                                                                 | IJ.IV        |
|     | f.                                                                      | Inspektur Investigasi                                                       |                                                                                                 | IJ.V         |
| 11. | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan |                                                                             |                                                                                                 | BD           |
|     | a.                                                                      | Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan |                                                                                                 | Set.BD       |
|     |                                                                         | 1)                                                                          | Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi                                                  | Set.BD.1     |
|     |                                                                         | 2)                                                                          | Kepala Bagian Keuangan                                                                          | Set.BD.2     |
|     |                                                                         | 3)                                                                          | Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian                                         | Set.BD.3     |
|     |                                                                         | 4)                                                                          | Kepala Bagian Umum dan Perpustakaan                                                             | Set.BD.4     |
|     | b.                                                                      | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan                |                                                                                                 | P.I          |
|     |                                                                         | 1)                                                                          | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Aliran dan Pelayanan Keagamaan                        | P.I.1        |
|     |                                                                         | 2)                                                                          | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Hubungan Antar Umat Beragama                          | P.I.2        |
|     |                                                                         | 3)                                                                          | Kepala Bidang Pelayanan Administrasi, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Penelitian dan Pengembangan | P.I.3        |
|     | c.                                                                      | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan     |                                                                                                 | P.II         |
|     |                                                                         | 1)                                                                          | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Formal                                     | P.II.1       |
|     |                                                                         | 2)                                                                          | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal                     | P.II.2       |

| NO  | NAMA UNIT ORGANISASI                         |                                                                                                 | KODE JABATAN |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 3)                                           | Kepala Bidang Pelayanan Administrasi, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Penelitian dan Pengembangan | P.II.3       |
|     | d.                                           | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan                          | P.III        |
|     | 1)                                           | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan                                      | P.III.1      |
|     | 2)                                           | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Khazanah Keagamaan                                    | P.III.2      |
|     | 3)                                           | Kepala Bidang Pelayanan Administrasi, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Penelitian dan Pengembangan | P.III.3      |
|     | e.                                           | Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi                                       | P.IV         |
|     | 1)                                           | Kepala Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan                                              | P.IV.1       |
|     | 2)                                           | Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                                          | P.IV.2       |
|     | 3)                                           | Kepala Bidang Pelayanan Administrasi, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pendidikan dan Pelatihan    | P.IV.3       |
|     | f.                                           | Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan                    | P.V          |
|     | 1)                                           | Kepala Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan                                              | P.V.1        |
|     | 2)                                           | Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                                          | P.V.2        |
|     | 3)                                           | Kepala Bidang Pelayanan Administrasi, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pendidikan dan Pelatihan    | P.V.3        |
| 12. | Staf Ahli Bidang Kehidupan Beragama          |                                                                                                 | SA.1         |
| 13. | Staf Ahli Bidang Kerukunan Umat Beragama     |                                                                                                 | SA.2         |
| 14. | Staf Ahli Bidang Lembaga Sosial Keagamaan    |                                                                                                 | SA.3         |
| 15. | Staf Ahli Bidang Pendidikan                  |                                                                                                 | SA.4         |
| 16. | Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia |                                                                                                 | SA.5         |

## 2. Kementerian Agama Tingkat Daerah

| NO | NAMA UNIT ORGANISASI                      |                                                       | KODE JABATAN |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi |                                                       |              |
|    | a.                                        | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh | Kw.01        |

| NO | NAMA UNIT ORGANISASI |                                                                                | KODE JABATAN |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | b.                   | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara                | Kw.02        |
|    | c.                   | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat                | Kw.03        |
|    | d.                   | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau                          | Kw.04        |
|    | e.                   | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi                         | Kw.05        |
|    | f.                   | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan              | Kw.06        |
|    | g.                   | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu                      | Kw.07        |
|    | h.                   | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung                       | Kw.08        |
|    | i.                   | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung               | Kw.09        |
|    | j.                   | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau                | Kw.10        |
|    | k.                   | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Kw.11        |
|    | l.                   | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat                    | Kw.12        |
|    | m.                   | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah                   | Kw.13        |
|    | n.                   | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta    | Kw.14        |
|    | o.                   | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur                    | Kw.15        |
|    | p.                   | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten                        | Kw.16        |
|    | q.                   | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali                          | Kw.17        |
|    | r.                   | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat           | Kw.18        |
|    | s.                   | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur           | Kw.19        |
|    | t.                   | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat              | Kw.20        |
|    | u.                   | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah             | Kw.21        |

| NO | NAMA UNIT ORGANISASI     |                                                                     | KODE JABATAN |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | v.                       | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan | Kw.22        |
|    | w.                       | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur   | Kw.23        |
|    | x.                       | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara     | Kw.24        |
|    | y.                       | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah    | Kw.25        |
|    | z.                       | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan   | Kw.26        |
|    | aa.                      | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara  | Kw.27        |
|    | bb.                      | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo          | Kw.28        |
|    | cc.                      | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat     | Kw.29        |
|    | dd.                      | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku             | Kw.30        |
|    | ee.                      | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara       | Kw.31        |
|    | ff.                      | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua              | Kw.32        |
|    | gg.                      | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat        | Kw.33        |
|    | hh.                      | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat        | Kw.34        |
|    | ii.                      | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara   | Kw.35        |
| 2. | Universitas Islam Negeri |                                                                     |              |
|    | a.                       | Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta        | Un.01        |
|    | b.                       | Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung         | Un.02        |
|    | c.                       | Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang        | Un.03        |
|    | d.                       | Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau           | Un.04        |
|    | e.                       | Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar                  | Un.05        |
|    | f.                       | Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta          | Un.06        |
|    | g.                       | Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya               | Un.07        |

| NO | NAMA UNIT ORGANISASI        |                                                                      | KODE JABATAN |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | h.                          | Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh                | Un.08        |
|    | i.                          | Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang               | Un.09        |
|    | j.                          | Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang                  | Un.10        |
|    | k.                          | Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan                | Un.11        |
| 3. | Institut Agama Islam Negeri |                                                                      |              |
|    | a.                          | Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten | In.01        |
|    | b.                          | Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nut Djati, Cirebon          | In.02        |
|    | c.                          | Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung              | In.03        |
|    | d.                          | Rektor Institut Agama Islam Negeri Mataram                           | In.04        |
|    | e.                          | Rektor Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang               | In.05        |
|    | f.                          | Rektor Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin             | In.06        |
|    | g.                          | Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon                             | In.07        |
|    | h.                          | Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo             | In.08        |
|    | i.                          | Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi     | In.09        |
|    | j.                          | Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta                         | In.10        |
|    | k.                          | Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu                          | In.11        |
|    | l.                          | Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung                       | In.12        |
|    | m.                          | Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu                              | In.13        |
|    | n.                          | Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan                   | In.14        |
|    | o.                          | Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak                         | In.15        |
|    | p.                          | Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate                           | In.16        |
|    | q.                          | Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto                        | In.17        |

| NO | NAMA UNIT ORGANISASI              |                                                                                 | KODE JABATAN |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | r.                                | Rektor Institut Agama Islam Negeri Samarinda                                    | In.18        |
|    | s.                                | Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo                                       | In.19        |
|    | t.                                | Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember                                       | In.20        |
|    | u.                                | Rektor Institut Agama Islam Negeri Salatiga                                     | In.21        |
|    | v.                                | Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya                                 | In.22        |
|    | w.                                | Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari                                      | In.23        |
|    | x.                                | Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa                                       | In.24        |
|    | y.                                | Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado                                       | In.25        |
|    | z.                                | Rektor Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi                                  | In.26        |
| 4. | Institut Hindu Dharma Negeri      |                                                                                 |              |
|    | a.                                | Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar                                    | Ihn.01       |
| 5. | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri |                                                                                 |              |
|    | a.                                | Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh | Sti.01       |
|    | b.                                | Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro Lampung                | Sti.02       |
|    | c.                                | Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar                             | Sti.03       |
|    | d.                                | Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu                         | Sti.04       |
|    | e.                                | Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus                                   | Sti.05       |
|    | f.                                | Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri                                  | Sti.06       |
|    | g.                                | Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh, Lhokseumawe               | Sti.07       |
|    | h.                                | Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone                               | Sti.08       |
|    | i.                                | Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan                               | Sti.09       |
|    | j.                                | Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan                              | Sti.10       |
|    | k.                                | Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo                                | Sti.11       |

| NO | NAMA UNIT ORGANISASI                     |                                                                                    | KODE JABATAN |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | l.                                       | Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung | Sti.12       |
|    | m.                                       | Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci                                    | Sti.13       |
|    | n.                                       | Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare                                   | Sti.14       |
|    | o.                                       | Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah, Jayapura                         | Sti.15       |
|    | p.                                       | Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong                                     | Sti.16       |
|    | q.                                       | Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh                 | Sti.17       |
|    | r.                                       | Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis                                  | Sti.18       |
| 6. | Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri      |                                                                                    |              |
|    | a.                                       | Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang                                   | Stk.01       |
|    | b.                                       | Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja                                   | Stk.02       |
|    | c.                                       | Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Protestan Tarutung                       | Stk.03       |
|    | d.                                       | Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya                             | Stk.04       |
|    | e.                                       | Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Manado                                   | Stk.05       |
|    | f.                                       | Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Ambon                          | Stk.06       |
|    | g.                                       | Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Protestan Sentani                        | Stk.07       |
| 7. | Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri        |                                                                                    |              |
|    | a.                                       | Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Puja Mataram                           | Sth.01       |
|    | b.                                       | Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya               | Sth.02       |
| 8. | Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri       |                                                                                    |              |
|    | a.                                       | Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah        | Stb.01       |
|    | b.                                       | Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Banten                         | Stb.02       |
| 9. | Balai Lajnah Pentashihan Mushaf Al'Quran |                                                                                    | Bpq.01       |

| NO  | NAMA UNIT ORGANISASI                     |                                                             | KODE JABATAN |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 10. | Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan |                                                             |              |
|     | a.                                       | Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan       | Bdl.01       |
|     | b.                                       | Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang      | Bdl.02       |
|     | c.                                       | Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Palembang   | Bdl.03       |
|     | d.                                       | Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Jakarta     | Bdl.04       |
|     | e.                                       | Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung     | Bdl.05       |
|     | f.                                       | Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang    | Bdl.06       |
|     | g.                                       | Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Surabaya    | Bdl.07       |
|     | h.                                       | Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Banjarmasin | Bdl.08       |
|     | i.                                       | Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Manado      | Bdl.09       |
|     | j.                                       | Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Makassar    | Bdl.10       |
|     | k.                                       | Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Denpasar    | Bdl.11       |
|     | l.                                       | Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Ambon       | Bdl.12       |
|     | m.                                       | Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Aceh        | Bdl.13       |
|     | n.                                       | Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Papua       | Bdl.14       |
| 11. | Balai Penelitian dan Pengembangan Agama  |                                                             |              |
|     | a.                                       | Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta      | Blit.01      |
|     | b.                                       | Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang     | Blit.02      |
|     | c.                                       | Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar     | Blit.03      |
| 12. | Kepala Kantor Urusan Haji Indonesia      |                                                             | Kuh.01       |
| 13. | Asrama Haji                              |                                                             |              |
|     | a.                                       | Kepala Asrama Haji Embarkasih Aceh                          | Ah.01        |
|     | b.                                       | Kepala Asrama Haji Embarkasih Medan                         | Ah.02        |

| NO  | NAMA UNIT ORGANISASI                    |                                                               | KODE JABATAN |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|     | c.                                      | Kepala Asrama Haji Embarkasih Padang                          | Ah.03        |
|     | d.                                      | Kepala Asrama Haji Embarkasih Jakarta                         | Ah.04        |
|     | e.                                      | Kepala Asrama Haji Embarkasih Surabaya                        | Ah.05        |
|     | f.                                      | Kepala Asrama Haji Embarkasih Banjarmasin                     | Ah.06        |
|     | g.                                      | Kepala Asrama Haji Embarkasih Balikpapan                      | Ah.07        |
|     | h.                                      | Kepala Asrama Haji Embarkasih Makassar                        | Ah.08        |
|     | i.                                      | Kepala Asrama Haji Embarkasih Lombok                          | Ah.09        |
| 14. | Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota |                                                               |              |
|     | a.                                      | Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kabupaten Aceh Besar | Kk.01.01     |
|     | b.                                      | Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kabupaten Aceh Barat | Kk.01.02     |
|     | c.                                      | Dst.                                                          |              |
| 15. | Kantor Urusan Agama Kecamatan           |                                                               |              |
|     | -                                       | Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis                           | Kua.13.02.03 |
|     | -                                       | Dst.                                                          |              |
| 16. | Madrasah                                |                                                               |              |
|     | a.                                      | Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri                             | Mi.09.01     |
|     | b.                                      | Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri                             | Mts.09.02    |
|     | c.                                      | Kepala Provinsi Madrasah Aliyah Negeri                        | Ma.09.03     |

### C. Pembentukan Singkatan

1. Singkatan nama Sator, Satker, dan UPT pada Kementerian Agama terdiri atas susunan huruf awal dari setiap kata pada kelompok kata yang disingkat dan ditulis dengan huruf kapital, tanpa tanda titik.
2. Demi kemudahan dalam pengucapan, dapat digunakan angka untuk menyebut atau menggantikan huruf yang diulang, misalnya PPPLK atau P3LK adalah singkatan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan.

#### CONTOH SINGKATAN KEMENTERIAN AGAMA

| No. | Nama                          | Singkatan |
|-----|-------------------------------|-----------|
| 1.  | Pusat Kerukunan Umat Beragama | PKUB      |
| 2.  | Universitas Islam Negeri      | UIN       |
| 3.  | Institut Agama Islam Negeri   | IAIN      |

| No. | Nama                                          | Singkatan |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|
| 4.  | Institut Hindu Dharma Negeri                  | IHDN      |
| 5.  | Sekolah Tinggi Agama Negeri                   | STAIN     |
| 6.  | Sekolah Tinggi Agama Kristen                  | STAKN     |
| 7.  | Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri | STAKPN    |
| 8.  | Sekolah Tinggi Agama Hindu                    | STAHN     |
| 9.  | Sekolah Tinggi Agama Buddha                   | STABN     |
| 10. | Kantor Urusan Haji Indonesia                  | KUHI      |
| 11. | Kantor Urusan Agama                           | KUA       |
| 12. | Madrasah Aliyah Negeri                        | MAN       |
| 13. | Madrasah Tsanawiyah Negeri                    | MTsN      |
| 14. | Madrasah Ibtidaiyah Negeri                    | MIN       |
| 15. | Unit Pelaksana Teknis                         | UPT       |
| 16. | Badan Layanan Umum                            | BLU       |
| 17. | Penyelenggaraan Haji dan Umrah                | PHU       |
| 18. | Barang Milik Negara                           | BMN       |
| 19. | Kerjasama Luar Negeri                         | KLN       |
| 20. | Pendidikan Diniyah                            | PD        |
| 21. | Pengelolaan Dana Haji                         | PDH       |

#### D. Pembentukan Akronim

1. Akronim nama Sator, Satker, dan UPT pada Kementerian Agama merupakan kependekan dua kata atau lebih yang berbentuk gabungan suku kata unsur-unsur nama tersebut di atas.
2. Akronim Sator, Satker, dan UPT pada Kementerian Agama diperlakukan sebagai sebuah kata yang diawali dengan huruf kapital, diikuti dengan huruf kecil, dan tidak diakhiri dengan tanda titik, misalnya Kankemenag bukan KANKEMENAG sebagai akronim dari Kantor Kementerian Agama. Selain itu, akronim dapat berbentuk alias yang memberikan gambaran tentang tugas dan fungsi nama Sator, Satker, dan UPT yang dipangkas, misalnya Pusdiklat Teknis adalah nama lain Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.

3. Selain mengikuti ketentuan di atas, pembentukan akronim juga dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek kemudahan pengucapan, kesesuaian dengan santun bahasa, dan tidak menimbulkan ejekan.

#### CONTOH AKRONIM KEMENTERIAN AGAMA

| No. | Nama                                                             | Akronim         |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Kementerian Agama                                                | Kemenag         |
| 2.  | Sekretariat Jenderal                                             | Setjen          |
| 3.  | Direktorat Jenderal                                              | Ditjen          |
| 4.  | Inspektorat Jenderal                                             | Itjen           |
| 5.  | Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan | Balitbangdiklat |
| 6.  | Biro Perencanaan                                                 | Rocan           |
| 7.  | Sekretariat Direktorat Jenderal                                  | Setditjen       |
| 8.  | Direktorat Pendidikan Tinggi Islam                               | Ditdiktis       |
| 9.  | Inspektorat Wilayah                                              | Itwil           |
| 10. | Pusat Pendidikan dan Pelatihan                                   | Pusdiklat       |
| 11. | Kantor Wilayah                                                   | Kanwil          |
| 12. | Kantor Kementerian Agama                                         | Kankemenag      |
| 13. | Bagian Akuntansi dan Pelaporan                                   | Bag Aklap       |
| 14. | Bidang Pondok Pesantren                                          | Bid Pontren     |
| 15. | Subdirektorat                                                    | Subdit          |
| 16. | Subbagian                                                        | Subbag          |
| 17. | Subbidang                                                        | Subbid          |
| 18. | Seksi Bimbingan Masyarakat                                       | Si Bimas        |
| 19. | Pembimbing Masyarakat                                            | Pembimas        |
| 20. | Penyelenggara Zakat dan Wakaf                                    | Gara Zawa       |
| 21. | Bimbingan Masyarakat                                             | Bimas           |

#### E. Pembentukan Gabungan Singkatan dan Akronim

Gabungan singkatan dan akronim adalah gabungan singkatan dan akronim atau akronim dan singkatan.

apabila akronim digabungkan dengan singkatan dan diperlakukan sebagai satu kata, penulisannya disatukan sebagai sebuah akronim, misalnya rokumkln merupakan akronim dari Biro Hukum dan KLN; dan

apabila gabungan akronim dengan singkatan tidak diperlakukan sebagai akronim, penulisannya dilakukan terpisah, misalnya Rokeu BMN sebagai gabungan akronim dan singkatan dari Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

## CONTOH GABUNGAN SINGKATAN DAN AKRONIM

| No. | Unit Organisasi                                                | Gabungan singkatan dan akronim/akronim dan singkatan |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.  | Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah             | Ditjen PHU                                           |
| 2.  | Biro Keuangan dan Barang Milik Negara                          | Rokeu dan BMN                                        |
| 3.  | Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri                          | Rokum KLN                                            |
| 4.  | Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren             | Dit PD Pontren                                       |
| 5.  | Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah | Setditjen PHU                                        |
| 6.  | Direktorat Pengelolaan Dana Haji                               | Dit PDH                                              |

## BAB III

### PENGUNAAN KODE JABATAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM

#### A. Penggunaan Kode Jabatan

1. Pembentukan dan penggunaan kode jabatan harus mempermudah komunikasi, khususnya dalam pengelolaan tata naskah dinas, tata naskah dinas elektronik, serta dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pembentukan kode jabatan harus tidak menimbulkan pertumpangtindihan kode jabatan pada Sator, Satker, dan UPT Kementerian Agama sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dan penulisan kode jabatan pada Sator, Satker, dan UPT pada Kementerian Agama dan tercipta kelancaran komunikasi.

#### B. Penggunaan Singkatan

1. Pembentukan dan penggunaan singkatan harus mempermudah komunikasi, khususnya dalam pengelolaan tata naskah dinas, tata naskah dinas elektronik, serta dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pembentukan singkatan harus tidak menimbulkan pertumpangtindihan singkatan nama Sator, Satker, dan UPT Kementerian Agama sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dan penulisan singkatan nama Sator, Satker, dan UPT pada Kementerian Agama dan tercipta kelancaran komunikasi.
3. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengelolaan tata naskah dinas atau tata naskah dinas elektronik, penulisan singkatan harus didahului dengan bentuk lengkapnya nama Sator, Satker, dan UPT Kementerian Agama. Untuk penulisan selanjutnya dapat digunakan singkatan saja.

### C. Penggunaan Akronim

1. Pembentukan dan penggunaan akronim harus mempermudah komunikasi, khususnya dalam pengelolaan tata naskah dinas serta tata naskah dinas elektronik dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pembentukan akronim harus tidak menimbulkan pertumpangtindihan akronim antar instansi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dan penulisan akronim nama-nama Sator, Satker, dan UPT Kementerian Agama sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dan penulisan akronim Sator, Satker, dan UPT pada Kementerian Agama dan tercipta kelancaran komunikasi.
3. Pembentukan dan penggunaan akronim harus dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan kesantunan dalam berbahasa dan tidak menimbulkan ejekan. Apabila timbul penolakan publik, akronim yang sudah ada dapat diubah.
4. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengelolaan tata naskah dinas atau tata naskah dinas elektronik, penulisan pertama kali akronim harus didahului dengan bentuk lengkap nama Satuan Organisasi/Kerja pada Kementerian Agama. Untuk penulisan selanjutnya dapat digunakan akronim saja.

### D. Penggunaan Gabungan Singkatan dan Akronim

1. Pembentukan dan penggunaan gabungan singkatan dan akronim harus mempermudah komunikasi, khususnya dalam pengelolaan tata naskah dinas serta tata naskah dinas elektronik, dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pembentukan gabungan singkatan dan akronim harus tidak menimbulkan pertumpangtindihan akronim nama Sator, Satker, dan UPT pada Kementerian Agama sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman serta penulisan gabungan singkatan dan akronim nama instansi dan tercipta kelancaran komunikasi.
3. Pembentukan dan penggunaan gabungan singkatan dan akronim harus dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan kesantunan dalam berbahasa dan tidak menimbulkan ejekan. Apabila timbul penolakan publik, gabungan akronim dan singkatan yang sudah ada dapat diubah.
4. Untuk menghindari kesulitan dalam pemahaman tata naskah dinas atau tata naskah dinas elektronik, penulisan nama Sator, Satker, dan UPT Kementerian Agama untuk pertama kali ditulis secara lengkap dan diikuti dengan gabungan singkatan dan akronim di dalam kurung. Dalam penulisan selanjutnya dapat digunakan gabungan singkatan dan akronim saja.

#### BAB IV PENUTUP

Kode Jabatan, Singkatan, dan Akronim pada Kementerian Agama dimaksudkan sebagai acuan bagi Sator, Satker, dan UPT Kementerian Agama dalam membentuk dan menggunakan kode jabatan, singkatan, dan akronim.

Berdasarkan keputusan ini diharapkan pemahaman, pembentukan, dan penggunaan kode jabatan, singkatan, dan akronim pada Kementerian Agama makin baik, kelancaran komunikasi makin meningkat, serta penyelenggaraan pemerintahan makin efisien dan efektif.

 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN *ls*